

Ketua MPR Belum

Dari Halaman 1

menerima laporan dari Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR sejak surat itu dikirim 6 Juni lalu.

MPR memang mengatakan, dirinya baru kembali usai masa reses anggota dewan sejak akhir Mei atau sebelum surat itu dikirim ke Setjen MPR.

"Teman-teman sekretariat belum melaporkan. Saya juga belum menerangkan, karena saya baru masuk setelah reses hari ini," kata Muzani.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Suftmi Dasco Ahmad juga mengatakan Surat Forum Purnawirawan TNI masih berada di Setjen DPR sejak dikirim di awal masa reses anggota dewan awal Juni lalu.

Dia bilang surat tersebut belum dikirim ke pimpinan DPR. Namun, Dasco mengatakan surat itu akan dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) dan badan musyawarah (Bamus) DPR dalam waktu dekat.

"Biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapat Pimpinan Bamus yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan," katanya, Selasa (24/6).**(cnni.js)**

Iran Tangkap 700

Israel, dan Cina serta Rusia berada dalam posisi lebih baik untuk membantu Pyongyang dibanding posisi Iran saat ini," ujar Easley.

Koordinasi Rusia dengan Iran dan Korea Utara

Easley menambahkan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga akan semakin bergantung pada aliansinya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperoleh teknologi senjata terbaru dalam jumlah cukup guna mempertahankan rezimnya.

"Tidak mengherankan jika Moscow segera menjamu menteri luar negeri Iran setelah serangan AS, dan Putin mengirim Sergei Shoigu untuk bertemu Kim Jong Un saat para pemimpin G7 berkumpul di Kanada," katanya.

"Koordinasi Rusia dengan Iran dan Korea Utara menunjukkan bahwa isu keamanan di berbagai kawasan kini semakin saling terkait."

Meski begitu, Chun menegaskan bahwa prioritas utama Kim tetaplah keselamatannya sendiri serta kelangsungan satu-satunya dinasti komunis di dunia.

Kim dikabarkan sangat terkejut ketika Presiden Trump memberi isyarat bahwa militer AS mengetahui lokasi persembunyian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan mendukung perubahan rezim di Teheran.

"Kim kini sangat terlindungi dari ancaman 'serangan asasinasasi', dengan sistem kerahasiaan tinggi atas lokasi dan pergerakannya," kata Chun.

"Saya yakin dia akan mempertahankan tingkat kerahasiaan itu, dan memastikan informasi tentang keberadaannya sangat terbatas." (**det/sj**)

Iran Bersumpah Akan Lanjutkan Program Nuklir

teknologi nuklir Teheran tak akan pernah bisa disetop oleh musuh.

Dia menekankan Iran memiliki kapasitas dan kapabilitas yang membuatnya tetap mampu melanjutkan progres nuklir tanpa bisa diganggu gugat.

Pada Minggu, Presiden AS Donald Trump mengklaim menyerang tiga situs nuklir Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordow. Ketiga situs itu diklaim hancur dan Iran tak lagi punya kemampuan untuk menciptakan senjata nuklir.

Kendati demikian, laporan intelijen AS yang dipublikasi oleh CNN dan The New York Times menyebut bahwa serangan itu tidak menghancurkan

curkan inti program nuklir negara tersebut. Laporan ini berdasarkan penilaian awal yang dilakukan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM).

Trump telah merespons laporan ini dengan menyebut CNN dan The New York Times melakukan hoaks karena fasilitas-fasilitas nuklir Iran benar-benar hancur total.

"SITUS-SITUS NUKLIR IRAN SUDAH BENAR-BENAR HANCUR!" kata Trump dalam unggahan di Truth Social, seperti dikutip AFP.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt juga telah membantah laporan itu. **(cnni/js)**

Kemenhub Buka Jalan Taksi Terbang Komersial

untuk membahas validasi sertifikat tipe (type certificate validation) terhadap produk EHang agar diakui secara resmi di Indonesia.

Jika validasi berjalan mulus, Indonesia dapat menyusun dan menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) bagi penggunaan taksit terbang tersebut secara komersial oleh operator dalam negeri.

“Insya Allah nanti sudah valid, sehingga kita bisa terbitkan SOP standar yang bisa digunakan untuk operasional komersial,” ujar Sokhib.

Sebagai informasi, validasi sertifikat tipe adalah proses verifikasi dan pengakuan desain produk oleh otoritas penerbangan sipil, guna memastikan produk memenuhi standar

Pada kesempatan yang sama, EHang 216-s melaksanakan uji coba terbang di Phantom Ground Park, PIK 2, Kabupaten Tangerang, setelah mengantongi izin uji terbang (demo flight) dari Kemenhub dengan membawa penumpang di dalam kabin.

Sebelumnya, kendaraan udara yang menyerupai drone raksasa ini telah beberapa kali melakukan uji terbang, baik dalam kondisi kosong maupun membawa boneka penumpang. Namun, kali ini menjadi momen perdana EHang 216-s melakukan penerbangan dengan penumpang manusia, tanpa kehadiran pilot di dalam kabin. **(rep/js)**

Prabowo Resmikan NSWAC

tidak perlu lagi pergi ke luar negeri," katanya.

RI 1 juga memuji kualitas teknologi dan kerja sama internasional yang menjadi dasar dari fasilitas tersebut.

"Saya melihat kerja sama ini sangat luar biasa. Fasilitas yang disediakan sangat modern, teknologinya mutakhir, dan sudah berhasil menarik perhatian pasien internasional. Ini adalah pencapaian besar yang patut kita banggakan," ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras hingga berhasil menghadirkan

aset penting ini bagi bangsa dan negara. Prabowo didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama RSUP Prof Ngoerah I Wayan Sudhana dan General Manajer NSWAC dr Nahla Shihab. Mereka bersama-sama meninjau berbagai fasilitas di pusat layanan yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Unit ini merupakan bagian dari pengembangan usaha RS Ngoerah yang fokus pada sektor wellness dan aesthetic. Terdapat empat layanan unggulan yang ditawarkan, yakni Medical Check-Up (MCU), Aesthetic Dentistry, Dermaesthetic, dan Plastic Surgery. **(rep/ls)**

Kejagung Resmi Ajukan Banding Vonis

(18/6/2025) memvonis Zarofo Ricar bersalah melakukan perampokan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Zarofo Ricar merupakan mantan petinggi di Mahkamah Agung (MA) yang terlibat dalam skandal suap-gratifikasi vonis bebas PN Surabaya, Jawa Timur (Jatim) terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Dalam putusannya, PN Tipikor Jakarta menyatakan Zarofo Ricar terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) a, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12B juncto Pasal 15, juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Atas vonis bersalah itu, hakim PN Tipikor menghukum Zarofo Ricar dengan pidana penjara selama 16 tahun. Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga menyatakan temuan uang Rp915 miliar dan

emas 51 Kilogram (Kg) dari rumah tinggal Zarof Ricar dirampas untuk negara. Menurut hakim, uang dan logam mulia yang ditemukan dari kediaman Zarof Ricar itu bersumber dari pendapatan yang tidak sah.

Namun, hukuman badan terhadap Zarof Ricar itu, sebetulnya lebih ringan dari tuntutan JPU. Semula JPU meminta majelis hakim menghukum Zarof Ricar selama 20 tahun penjara.

Dalam perkara lain, Zarof Ricar pun saat ini masih sebagai tersangka terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sangkaan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid-sus) tersebut, terkait dengan temuan uang hampir satu triliun, dan emas batangan yang ditemukan saat penyidikan awal. (bc)



Dari Halaman 1

diaan dan keterjangkauan. Pemerintah bangga menyebut stok aman, namun fakta di pasar berkata lain. Di banyak daerah, harga beras justru semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Rakyat kecil menderita, bukan karena tidak ada beras, melainkan karena beras yang ada tak bisa mereka beli dengan layak.

Sumbar masalah utama bukan kekurangan stok, melainkan lemahnya distribusi. Cadangan beras yang melimpah hanya tersimpan di gudang, tak terhubung langsung dengan pasar yang membutuhkan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pun belum sepenuhnya menjangkau wilayah-wilayah dengan lonjakan harga.

Distribusi yang lambat, birokratis, dan kurang tepat sasaran membuat pasar tetap bergantung pada jalur swasta, yang cenderung mencari keuntungan tinggi. Di titik inilah ketimpangan akses pangan menjadi nyata: wilayah surplus mengalami penurunan harga, sementara daerah lain justru dibebani kenaikan harga tanpa kontrol.

Dalam situasi seperti ini, yang paling terdampak adalah buruh harian, pedagang kecil, ibu rumah tangga di pasar tradisional—mereka yang hidup dari pemasukan harian dan harus membeli beras dengan harga yang terus naik. Ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal keadilan pangan.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya lahan dan petani yang melimpah. Namun, hal itu belum sejalan dengan efisiensi sistem pangan nasional. Petani tetap berada di posisi terlemah dalam rantai pasok, sedangkan margin keuntungan disedot oleh tengkulak dan spekulan.

Harga beras yang tinggi pun tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani. Di banyak tempat, harga gabah tetap rendah, sementara selisih harga dari gabah ke beras dipenuhi oleh mata rantai yang panjang dan tidak transparan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan belum berbanding lurus dengan kecukupan pangan. Negara masih kalah oleh mekanisme pasar bebas dan oligarki distribusi. Dan ketika sistem tak berpihak pada konsumen maupun produsen, maka keduanya sama-sama dirugikan.

Pemerintah memang telah menyalurkan bantuan pangan dan memperluas SPHP, namun langkah ini hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Intervensi semacam bansos beras perlu, tetapi tidak cukup. Kita butuh reformasi sistem pangan, dari distribusi, logistik, hingga tata niaga yang lebih adil.

Salah satu kuncinya adalah membangun transparansi dan integrasi data stok-akses-kebutuhan antar-wilayah secara real-time. Dengan sistem digital yang kuat, pemerintah dapat memetakan daerah rawan harga tinggi dan mengintervensi lebih cepat, tanpa harus menunggu gejala sosial.

Lebih jauh, operasi petani perlu diperkuat agar mereka tidak terus bergantung pada tengkulak. Negara juga perlu hadir dalam sistem perdagangan pangan yang berpihak dan mencegah manipulasi harga oleh spekulan.

Beras bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia adalah simbol kehidupan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat. Maka, ketika harga beras tak terkendali padahal stok tersedia, itu menandakan kegagalan sistemik dalam pengelolaan hak dasar warga negara.

Jika negara hadir untuk melindungi rakyat, maka kehadiran itu harus nyata—mulai dari sawah petani hingga dapur rumah tangga. Selama rakyat kecil masih menjerit saat belanja di pasar, kita tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang gagal mengelola pangan sebagai hak, bukan sekadar barang dagangan.